

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan maksud judul penelitian serta memudahkan pembaca untuk memahaminya, maka perlu penulis berikan beberapa batasan terhadap istilah-istilah dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Peran KUD Tani Makmur

Dalam kamus besar bahasa Indonesia¹, kata peran di definisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang atau badan yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam penelitian ini kata peran diartikan sebagai andil, sumbangsih dan pengaruh KUD Tani Makmur dalam membantu proses pemberdayaan kelompok Tani Dusun Bibis di kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Sedangkan KUD Tani Mamur adalah Koperasi Unit Desa yang terletak di Dusun Mrisi, desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Termasuk salah satu koperasi terbaik di wilayah propinsi D.I Yogyakarta. Memiliki berbagai jenis usaha barang dan jasa yang tergolong pada koperasi yang memiliki klasifikasi A (sangat mantap).

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan artinya mengembalikan atau menghidupkan kembali kemandirian masyarakat dari pembangunan yang bersifat menekan, memaksa,

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 667

mengeksploitasi, mengintervensi, melanggar hak-hak kemanusiaan dari pihak-pihak (pemerintah, LSM, sektor bisnis) terhadap pihak lain (sekelompok masyarakat dimanapun)². Menghidupkan kembali kemandirian berarti meninggalkan intervensi pemerintah terhadap hal-hal yang tidak perlu campur tangan pemerintah. Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengubah atau meningkatkan kondisi masyarakat Dusun Bibis yang berkaitan dengan masalah partisipasi, kesadaran kritis, akses, SDM dan kesejahteraan yang dilakukan oleh KUD Tani Makmur.

3. Kelompok Tani

Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang menghimpun diri dalam suatu organisasi/paguyuban tani. Yang dimaksud dengan kelompok tani dalam penelitian ini adalah kelompok petani yang berasal dari Dusun Bibis kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, yang mana mereka menghimpun diri dalam suatu kelompok sebab mereka memiliki keserasian atau kecocokan yang sama dalam tujuan, motif, dan minat dalam bertani. Dan biasanya mereka bergabung sesuai dengan jenis tanaman yang mereka tanam. Misalnya petani tebu, petani lombok, petani buah dan sebagainya.

Jadi maksud judul secara keseluruhan adalah “Sumbangsih KUD Tani Makmur dalam proses pemberdayaan masyarakat kelompok tani Dusun Bibis dalam upaya peningkatan kehidupan perekonomian dan pendidikan melalui berbagai program pengembangan usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,

² Susetiawan, makalah disampaikan pada civitas akademika Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa Yogyakarta, 11 September 2001.

antara lain simpan pinjam, pembelian pupuk dan alat-alat pertanian, penyuluhan dan bimbingan usaha”.

B. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi nasional yang seimbang, serasi dan selaras menurut cita-cita UUD 1945 pasal 33 adalah kehidupan ekonomi dimana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak boleh jatuh ke tangan perseorangan. Dalam GBHN 1993, asas keseimbangan, keserasian, keselarasan menunjukkan perlunya dijaga keseimbangan antara berbagai kepentingan, baik antara pusat dan daerah serta segala jenis lapisan masyarakat baik pengusaha, pegawai, buruh, terutama petani yang merupakan mayoritas profesi yang digeluti masyarakat Indonesia.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan 1997 merupakan awal krisis yang teramat berat dan berkepanjangan. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan prasyarat stabilitas politik dan keamanan telah membawa akibat persoalan laten yang tak kunjung selesai. Kemiskinan yang menjurus kepada ketidakberdayaan masyarakat, pengangguran semakin meluas, jurang kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin, ketidakadilan sosial, serta berbagai dampak sosial lainnya semakin memperjelas kekeliruan strategi pembangunan yang selama ini dijalankan. Ironis bukan ketika perusahaan-perusahaan konglomerat yang jumlahnya hanya 200-an namun menguasai lebih dari 80 % perekonomian nasional. Konglomerasi dari sekelompok kecil pengusaha besar ini tidak didukung oleh semangat kewirausahaan

sejati. Fasilitas-fasilitas istimewa yang diberikan pemerintah kepada mereka mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi rapuh dan tidak kompetitif. Landasan ekonomi yang dianggap kuat selama tiga puluh dua tahun Orde Baru, ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan nasional.

Akibat krisis, sementara konglomerat dan pengusaha monopolis hancur, dunia usaha kita masih menyisakan unit-unit usaha ekonomi rakyat (kecil dan menengah) yang dengan tekun mengolah dan mengelola sumber daya lokal masih tetap eksis dan dapat bertahan. Usaha ekonomi kerakyatan ini karena mengandalkan kepada bahan baku lokal dan tidak begitu bergantung kepada kekuatan asing, dapat dijadikan dasar untuk membangun fundamental ekonomi Indonesia paska krisis. Hikmah yang dapat dipetik dari terjadinya krisis tersebut adalah munculnya kembali kesadaran akan pentingnya kemandirian. Dan kesadaran akan bahaya ketergantungan asal-asalan serta kesadaran akan pentingnya produk dalam negeri dan pasar dalam negeri. Pemikiran ulang tentang strategi pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan suatu keharusan.

Koperasi Sebagai Sebuah Pilihan

Untuk mewujudkan cita-cita diatas, salah satu solusinya adalah dengan mengoptimalkan fungsi dari sumber-sumber ekonomi rakyat, antara lain adalah koperasi. Koperasi merupakan soko guru perekonomian rakyat yang mampu menjembatani masyarakat tani agar terhindar dari para pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti para tengkulak, rentenir dan sebagainya³.

³ Dimas Wijanarko, Koperasi Dalam Pusaran Pembangunan (Media Komunitas) Purwokerto: KOPERMA UNSOED, edisi I 2002. hal. 14

Koperasi sebagai lembaga ekonomi berdasar atas asas kekeluargaan harus dikembangkan, didorong dan dibimbing, agar makin mandiri dan mampu berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai badan usaha swasta koperasi berhak berkembang sendiri secara bebas seperti usaha-usaha lainnya, dalam batas-batas profesionalisme dan tata nilai yang berlaku. Dengan pengelolaan yang profesional, pembentukan koperasi juga tidak asal-asalan, misalnya koperasi dibentuk karena ada 20 orang yang bersepakat. Lebih dari itu pembentukan koperasi harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan bersama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dengan demikian koperasi dapat berfungsi secara maksimal dan dengan asas kekeluargaan yang dimiliki, koperasi benar-benar lembaga ekonomi yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat.

Koperasi sebagai organisasi selain berfokus pada bidang ekonomi dalam memenuhi kebutuhan bersama, namun juga sebagai organisasi pemberdayaan anggota-anggotanya. Hal inilah yang membedakan antara koperasi dengan badan usaha lainnya seperti CV, PT atau BUMN. Koperasi sebagai lembaga ekonomi hanya dapat dikenal dari jati dirinya. Jati diri koperasi tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi mengalami proses panjang secara berkesinambungan selama satu setengah abad. Ciri-ciri, watak dan tingkah laku koperasi terbentuk sejak kelahirannya dan dikaji dan dirumuskan ulang oleh *International Cooperative Alliance (ICA)* sebagai organisasi internasional, puncak dari seluruh gerakan koperasi di dunia.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat petani. Penulis berasumsi bahwa tema ini sangat relevan untuk dikaji dengan alasan bahwa peningkatan ekonomi yang berbasis kerakyatan harus

mendapat prioritas untuk dikembangkan, salah satu pilarnya adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Hal ini harus mendapat perhatian serius baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Apalagi jika dikaitkan dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang belakangan ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan.

Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur yang terdapat di Dusun Mrisi, Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, merupakan salah satu KUD berprestasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, hal terbukti dengan klasifikasi A (sangat mantap) yang diperoleh KUD ini sejak tahun 1997 hingga sekarang. KUD ini berdiri pada tahun 1973 dengan anggota hingga saat ini berjumlah 14.771 anggota. Wilayah kerjanya meliputi 4 desa dan 53 pedusunan yang semuanya berada di wilayah Kecamatan Kasihan. Memiliki berbagai jenis unit usaha, seperti: unit jasa (wartel, waserda) unit USP (KCK, KU, BBM) unit listrik, unit Saprotan dll. dan memiliki total aset sebesar Rp. 1.010.713.388,- (*satu milyar sepuluh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*) sesuai dengan laporan keuangan per 31 Desember 2003.⁴

Adapun bentuk-bentuk usaha pemberdayaan yang dilakukan Koperasi Tani Makmur terhadap anggotanya yang mayoritas petani adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan alat-alat pertanian (Pupuk, cangkul, obat-obatan tanaman, dll) khusus kepada para anggota diberikan keringan dalam masalah harga dan sistem pembayaran.

⁴ Draft RAT – XXVIII KUD Tani Makmur, Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta, 2003.

2. Mengikut sertakan para anggota secara bergantian dalam pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan mereka, baik dalam bidang usaha maupun teknik pertanian.
3. Melibatkan anggota secara langsung dalam mengelola secara langsung dalam mengelola unit-unit usaha Koperasi Tani Makmur. Disamping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, juga diarahkan untuk pembinaan kewirausahaan.
4. Pemberian kredit untuk pengembangan usaha dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan anggota.
5. Membuka usaha jasa peminjaman traktor tangan kepada anggotanya yang mayoritas adalah kelompok petani dengan uang sewa yang lebih murah dari usaha jasa sejenis lainnya.

Dengan segala pertimbangan diatas, penulis ingin mengangkat profil koperasi tersebut diatas sebagai sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul :

“Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur Sebagai Wadah Pemberdayaan Kelompok Tani Dusun Bibis di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta”.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis kaji dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana profil KUD Tani Makmur sebagai sebuah lembaga ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggotanya?
2. Bagaimana masalah-masalah yang dihadapi kelompok tani Dusun Bibis?
3. Bagaimana peran KUD Tani Makmur dalam pemberdayaan kelompok tani Dusun Bibis?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui profil KUD Tani Makmur sebagai sebuah lembaga ekonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan anggotanya.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi kelompok tani dusun Bibis.
3. Untuk mengetahui Peranan KUD Tani Makmur dalam proses pemberdayaan kelompok tani Dusun Bibis dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota kelompok tani.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, adapun kegunaan penelitian yang penulis maksud adalah :

1. Kegunaan teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kelompok tani melalui lembaga ekonomi yaitu Koperasi Unit Desa.
2. Kegunaan Praktis, bagi seluruh praktisi dan pihak-pihak yang konsentrasi dibidang pengembangan masyarakat, semoga penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan dalam mencari format ideal dalam memberdayakan masyarakat, terutama kelompok tani. Khususnya bagi pengurus KUD Tani Makmur, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan program pembinaan dan pelayanan kepada kelompok

Tani di kecamatan Kasihan kabupaten Bantul yang juga merupakan anggota dari Koperasi Tani Makmur.

F. Kerangka Teori

Sebagai bahan perbandingan untuk skripsi ini, sebelumnya sudah ada penelitian yang mengangkat masalah yang hampir sama dengan masalah yang sedang penulis teliti, hanya saja skripsi tersebut lebih terfokus pada persoalan ekonomi. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saudari Apriani Maritin, mahasiswi fakultas ekonomi Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta angkatan tahun 1995, dengan judul skripsi *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penulis menjadikan penelitian tersebut sebagai salah satu bahan acuan dalam penyusunan kerangka teori.

1. Tinjauan Tentang Koperasi.

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama” ada juga yang mengartikan koperasi dengan makna lain. Enriques⁵ memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*). Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerjasama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial. Karakter koperasi berdimensi ganda (ekonomi dan sosial), sehingga untuk menjelaskan fenomena kerjasama dalam koperasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengetahuan dasar dari kondisi sosial,

⁵ Arifin Sitio & Halomoan Sitamba, *Koperasi Praktek dan Teori*, Jakarta: Erlangga, 2002. hal. 13

terlebih dahulu harus mengetahui pengetahuan dasar dari kondisi sosial, ekonomi, politik, dan etika. Dalam hal ini koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi sosial, yaitu cara manusia hidup, bekerja, dan bermain dalam masyarakat.
- b. Fungsi ekonomi, yaitu cara manusia membiayai kelangsungan hidupnya dengan bekerja dalam masyarakat.
- c. Fungsi politik, yaitu cara manusia memerintah dan mengatur diri mereka sendiri melalui berbagai hukum dan peraturan.
- d. Fungsi etika, yaitu cara manusia berperilaku dan meyakini kepercayaan mereka, falsafah hidup mereka, dan cara berhubungan dengan Tuhan mereka.

1). Defenisi Koperasi

Drs. Muhammad Hatta, sebagai Bapak Koperasi Indonesia memberikan defenisi koperasi sebagai berikut; "Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan untuk memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang". Sementara defenisi koperasi menurut UU No. 25/1992 tentang perkoperasian sebagai berikut; "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Berdasarkan batasan koperasi ini, koperasi Indonesia memiliki 5 unsur sebagai berikut :

- a) **Koperasi adalah badan Usaha.** Sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, dimana sistem ini akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.
- b) **Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi.** Ini berarti bahwa, koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini UU Nomor 25 tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
- c) **Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.** Menurut UU No. 25 tahun 1992, ada 7 prinsip koperasi Indonesia. Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi Indonesia.
- d) **Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.** Ini berarti bahwa, koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.
- e) **Koperasi Indonesia “berasaskan kekeluargaan”.** Dengan asas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari asas kekeluargaan yang dimaksud adalah

adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktifitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

2). Tujuan dan Fungsi Koperasi

Dalam UU. No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Dalam tujuan tersebut disebutkan bahwa koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan meningkatnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat meningkat pula. Apabila tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan riil para anggotanya. Dengan demikian pengertian sejahtera yang bersifat abstrak dan relatif harus diubah menjadi pengertian yang lebih

Konkret dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata.

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dengan jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya).

Selanjutnya fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu :

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3). Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia

Dalam sejarah perundang-undangan koperasi Indonesia, sejak Indonesia merdeka sudah ada 4 UU yang menyangkut perkoperasian, yaitu UU. No.79 tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi, UU. No. 14 tahun 1965, UU. No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian dan UU. No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Dalam UU. No. 12 tahun 1967, istilah prinsip koperasi dikenal dengan sebutan "sendi-sendai dasar koperasi", sementara dalam UU. No. 25 tahun 1992 istilah tersebut dikenal dengan sebutan "prinsip koperasi"⁶.

Prinsip-prinsip atau sendi dasar koperasi menurut UU. No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut :

- a) Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap Warga Negara Indonesia.
- b) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
- c) Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota.
- d) Adanya pembatasan bunga atas modal
- e) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- f) Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
- g) Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU. No. 25 tahun 1992 dan berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d) Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
- e) Kemandirian
- f) Pendidikan Koperasi
- g) Kerjasama antar koperasi

Dari kedua prinsip koperasi tersebut dapat dilihat bahwa esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha tidaklah berbeda secara nyata. Hanya saja dalam UU. No. 25 tahun 1992 ada penambahan mengenai prinsip kerjasama antar koperasi. Ini dapat dipahami bahwa untuk mengantisipasi trend globalisasi ekonomi, koperasi perlu meningkatkan tawar-menawarnya dengan menjalin kerjasama antar koperasi.

⁶ *Ibid*, hal 25.

4). Jenis-jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi dapat dibedakan sebagai berikut⁷

a). Menurut usaha pokok yang dijalankan terdapat beberapa jenis koperasi, antara

lain :

- (1). Koperasi Kredit
- (2). Koperasi Konsumsi
- (3). Koperasi produksi barang dan jasa

b). Menurut aneka ragam unit usahanya, terdapat dua jenis koperasi :

- (1). Koperasi usaha tunggal (single purpose)
- (2). Koperasi usaha majemuk atau serba usaha (multi purpose)

c). Menurut jenis usaha sektor dan subsektor ekonomi dalam masyarakat :

- (1). Koperasi Pertanian
- (2). Koperasi Perkebunan
- (3). Koperasi Peternakan
- (4). Koperasi Kerajinan
- (5). Koperasi Perindustrian
- (6). Koperasi Perikanan
- (7). Koperasi Pengangkutan
- (8). Koperasi Pelayaran
- (9). Koperasi Perumahan dan sebagainya.

d). Menurut hasil yang diusahakan atau komoditi barang atau bahan yang dihasilkan terdapat beberapa jenis koperasi, antara lain :

- (1). Koperasi Karet
- (2). Koperasi Tembakau
- (3). Koperasi Kopra
- (4). Koperasi Tebu
- (5). Koperasi Vanili
- (6). Koperasi Susu dan sebagainya.

e). Menurut lingkungan daerah kerjanya terdapat beberapa jenis koperasi antara lain :

- (1). Koperasi Pasar
- (2). Koperasi Unit Desa
- (3). Koperasi Serba Usaha Perkotaan dan sebagainya.

⁷ Edilius & Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : RhinekaCipta, 1996 hal 178

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan (*Empowerment*) berarti memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat atau individu untuk menggali potensi yang dimiliki untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar mampu mandiri. Pemberdayaan menjadi sangat populer hingga saat ini, hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang atau sekelompok memfasilitasi masyarakat selalu dikaitkan dengan terminologi pemberdayaan. Pertanyaan tentangnya adalah kapan kita tidak lagi menggunakan terminologi ini? Jawaban yang sangat dekat adalah kalau para *funding* tidak lagi mengemukakan isu tentang pemberdayaan. Atau sekurangnya ada perkembangan lain yang pada umumnya dikemukakan oleh orang barat tentang isu pembangunan yang sedang berlangsung di Negara Berkembang.

Isu pemberdayaan tidak berarti bermakna negatif, namun penggunaannya perlu diletakkan sesuai dengan konteks dimana masyarakat berada. Masyarakat yang berada dalam sebuah rezim yang otoriter, yang tidak memberi kebebasan kepada masyarakat untuk berkreasi, tertekan baik secara sosial, politik, ekonomi, perlu mengemukakan isu pemberdayaan untuk merubah kekuatan dominasi yang berakibat pada ketidakberdayaan.

Permasalahan sosial dalam pemberdayaan pertanian akhir-akhir ini disadari sebagai faktor yang menentukan keberhasilan adopsi teknologi di tingkat petani. Diantara berbagai permasalahan sosial yang ada, kelembagaan merupakan salah satu faktor yang dicermati untuk mengetahui kelembagaan yang perlu mendapatkan prioritas berkaitan dengan upaya usaha tani khususnya padi.

b. Metode Pemberdayaan

Metode yang tepat untuk merubah keadaan dari adanya kekuatan dominasi kepada kondisi masyarakat yang mandiri baik secara sosial, politik dan ekonomi adalah menggunakan konsep pemberdayaan (*empowerment*) bukan konsep pembangunan (*developmentalism*). Sebab pemberdayaan lebih sosial pada perubahan kualitas yang mencakup perubahan relasi kelas dan gender secara adil, legaliter dan demokratis. Menurut John Clark⁸, aspek yang terkandung dalam konsep pemberdayaan dapat dilihat dari lima parameter; kuasa, partisipasi, kesadaran kritis, akses atau sumberdaya dan kesejahteraan. Inti pemberdayaannya adalah upaya untuk mengubah atau meningkatkan kondisi yang berkaitan dengan lia sosial tersebut.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari banyaknya gedung-gedung yang baru dibangun, akan tetapi yang lebih disubstansial adalah pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan mencakup segala aspek kehidupan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, melindungi dan berpihak kepada yang lemah. Dan pada akhirnya akan mencapai kemandirian masyarakat baik dari bidang ekonomi, politik dan sosial. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah :

- c. Sosialisasi program yang diawali dengan perkenaan antara fasilitator dan petani dilanjutkan dengan penjelasan enam isu tentang program, yaitu; apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana.
- d. Menerapkan pendekatan partisipatif dan bottom-up dan
- e. Mengikutsertakan ibu tani yang berperan sebagai motivator dalam adopsi serta sosialisasi ekonomi.

⁸ John Clark, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana 1995. hal 235

- 3) Mengikutsertakan ibu tani yang berperan sebagai motivator dalam adopsi serta sosialisasi teknologi.

c. Koperasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

1). Membangun Masyarakat Mandiri Lewat Koperasi

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan *self development*, maka kemandirian adalah kata kunci dari pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Dimensi-dimensi otonomi juga mengandung syarat akan perlunya kemandirian masyarakat untuk bebas berfikir, berekspresi dan mengungkapkan potensi dalam berpartisipasi, begitu juga dengan kemampuan kontrol masyarakat untuk mengambil keputusan. Konsep otonomi harus memenuhi tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi yang berarti adanya kemandirian ekonomi masyarakat, dimensi politik dimana masyarakat mempunyai kebebasan berorganisasi tanpa intervensi pemerintah, dan dimensi psikologi yang berhubungan dengan perasaan kebebasan kolektif dalam menentukan nasibnya sendiri. Dimensi-dimensi tersebut dapat terimplementasi dalam lembaga, dimana masyarakat dapat memberdayakan dirinya secara mandiri dan nilai demokrasi akan tumbuh dan berkembang, salah satu lembaga kemasyarakatan tersebut adalah Koperasi Unit Desa.

Koperasi secara definitif, merupakan perkumpulan yang otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, budaya mereka yang sama, melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokratis. Nilai-nilai yang terkandung di dalam koperasi mencakup nilai kemandirian, demokrasi, persamaan, keadilan,

dan solidaritas. Nilai tersebut merupakan prasyarat yang harus ada bagi terciptanya otonomi daerah.

Untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke masyarakat khususnya anggota, koperasi melakukan upaya-upaya pemberdayaan melalui program-program pendidikan yang terencana dan sistematis. Pendidikan inilah yang menjadi tulang punggung perkembangan dan kemajuan koperasi, karena tingkat kesadaran dan partisipasi anggota sangat ditentukan oleh keberhasilan pendidikan di koperasi. Dengan demikian pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki semangat yang sama dan sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh koperasi. Pembangunan ekonomi berbasis lokal dengan mengedepankan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi adalah sebagai tuntunan konsekuensi otonomi daerah. Telah terbukti bahwa merekalah yang tahan krisis. Prinsip-prinsip dasar koperasi sebagai konsep yang menekankan kepada pemberdayaan anggota yang juga sebagai anggota masyarakat sesuai dengan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat.

2). Koperasi Sebagai Gerakan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hubungan kekeluargaan sebagai asas koperasi seperti termuat dalam pasal 33 UUD 1945, koperasi merupakan badan usaha yang bersifat humanis. Setiap anggota yang terikat dalam koperasi, percaya dan mengedepankan nilai-nilai etis kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli pada orang lain. Karena dalam koperasi memuat nilai-nilai kemandirian, keterbukaan, persamaan, keadilan, demokrasi dan solidaritas yang

harus diciptakan bersama. Oleh karena itu untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam prakteknya perlu dijabarkan dalam tujuh prinsip koperasi, yaitu:

- a) Keanggotaan yang sukarela dan terbuka,
- b) Pengawasan demokratis oleh anggota,
- c) Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi,
- d) Otonomi dan kemandirian,
- e) Pendidikan, latihan dan informasi,
- f) Kerjasama antar koperasi dan
- g) Kepedulian terhadap masyarakat.

Ketujuh prinsip inilah yang menjadi pijakan bagi gerakan koperasi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi lewat bangun usaha koperasi yang benar⁹

Koperasi merupakan gerakan sosial yang memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan. Upaya-upaya pemberdayaan lewat pendidikan dan pelatihan yang terprogram dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki koperasi. Ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat dengan tujuan terciptanya manusia mandiri, berdaulat dan partisipatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian lapangan (*field research*).

Penulis memilih jenis penelitian ini karena untuk mendapatkan data, penulis harus terjun langsung ke lapangan bertemu dengan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Penulis juga harus melihat langsung kondisi koperasi

⁹ Dimas Wijanarko, *Op. cit*, hal. 17

di lapangan serta kondisi masyarakat tani yang juga menjadi anggota dari KUD Tani Makmur.

2. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pengurus dan anggota KUD Tani Makmur, juga para kelompok tani baik yang menjadi anggota KUD Tani Makmur maupun yang bukan anggota, khususnya kelompok tani di Dusun Bibis. Pejabat pemerintah setempat serta tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh ataupun berdomisili disekitar lokasi penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini :

- a. Profil Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur
- b. Kondisi masyarakat Dusun Bibis serta persoalan yang dihadapi
- c. Peran KUD Tani Makmur dalam memberdayakan kelompok tani

Dusun Bibis melalui program atau kegiatan yang dilakukan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode ini diperlukan untuk mencari informasi seputar persoalan yang sedang penulis teliti. Bahkan pendapat dari para informan akan dijadikan dasar dalam pembuatan karya ilmiah ini. Sebelumnya penulis menyusun *out line* daftar pertanyaan yang akan

diajukan kepada informan, kemudian penulis menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai informan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.¹⁰

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data dan gambaran secara langsung tentang proses berlangsungnya program pemberdayaan, yang mencakup metode pemberdayaan, jenis-jenis pemberdayaan, para peaku, materi, waktu, tempat, peserta dan sebagainya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara melihat dan membaca dokumen-dokumen dari KUD Tani Makmur. Baik berupa buku, majalah, bulletin atau album kegiatan serta arsip-arsip lain yang memuat masalah program pemberdayaan yang dilakukan oleh KUD Tani Makmur.

5. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif. Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis kemudian disusun secara sistematis, setelah itu dijelaskan dan selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu metode yang memanfaatkan data (kualitatif) dari hasil observasi, wawancara bebas, diskusi kelompok dan dokumentasi yang relevan atau

¹⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Rosda Karya, 1998. hal. 70

berhubungan, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas atas hasil analisis kuantitatif sebelumnya.¹¹



¹¹ Nasruddin Harahap, *Interaksi Sosial Transmigrasi dengan Penduduk Lokal*. dalam Jurnal Populis BEMJ PMI Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, hal. 51.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Profil KUD Tani Makmur adalah sebuah lembaga ekonomi desa yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan memiliki berbagai unit usaha, aset dan tenaga kerja yang cukup pengalaman, KUD Tani Makmur sudah memenuhi syarat sebagai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai mediator atau fasilitator dalam pemberdayaan anggota atau kelompok tani khususnya di Dusun Bibis.
2. Masalah-masalah yang dihadapi kelompok tani Dusun Bibis adalah minimnya pengetahuan para petani tentang sarana produksi pertanian, sulitnya mendapatkan bibit pupuk, obat-obatan serta peralatan pertanian berkualitas unggul dengan harga terjangkau dan mudah didapat, minimnya pengetahuan petani tentang teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, sulitnya mendapatkan bantuan kredit untuk memperluas usaha pertanian, petani kurang memiliki *bargaining power* untuk menentukan harga gabah dan hasil panen lainnya, petani masih menghadapi kendala dalam masalah komunikasi dan transportasi untuk memasarkan hasil pertanian, kebijakan pemerintah yang kurang populis dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan para petani, misalnya kebijakan impor beras pada saat sedang panen raya sehingga para petani kesulitan untuk menjual harga panennya.

3. Proses pemberdayaan kelompok tani di Dusun Bibis yang dilakukan oleh KUD Tani Makmur adalah melalui pemberdayaan ekonomi seperti; pemberian kredit (KCK, KUT, Kredit Simpan Pinjam), di unit jasa seperti; Unit Listrik, Unit Tebu Rakyat Intensifikasi, program Rice Milling Unit (RMU), Unit Pengadaan Beras, Unit Gula Pasir, Unit Pelayanan KB Mandiri, Unit Usaha Penjualan, Unit Saprotan, Unit Waserda dan Wartel,

B. Saran-Saran

1. Hendaknya KUD Tani Makmur selalu melakukan evaluasi untuk perbaikan program kedepan yang lebih kreatif, efektif dan tepat sasaran. Dan masih ada program yang perlu disentuh yaitu pendidikan, yang ditujukan untuk anak-anak dari anggota kelompok tani dengan memberikan program beasiswa dan penjualan perlengkapan sekolah dengan harga yang murah dan berkualitas baik.
2. Hendaknya KUD Tani Makmur dapat menampung hasil panen dari petani dengan harga yang memadai. Hal tersebut dapat memberikan solusi kepada petani jika sewaktu-waktu harga hasil panen turun.
3. Kelompok tani Dusun Bibis diharapkan dapat mengikuti semua program yang ada pada KUD Tani Makmur, agar dapat lebih meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
4. Hendaknya KUD Tani Makmur lebih meningkatkan kerjasama dengan bank-bank yang ada agar program-program KUD Tani Makmur tidak ada masalah keterbatasan dana.

Daftar Pustaka

- Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000.
- Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi, Teori dan Praktek*, Jakarta; Erlangga, 2002
- Adhitya Wardhono, *Memerdekakan Koperasi Indonesia*, Artikel dimuat di Harian Jawa Pos-Radar Jember tanggal 9 Juli 2001.
- Departemen Pertanian, *Jurnal Pusat Penyuluhan Pertanian*, Jakarta; 2001
- Dimas Wijanarko, *Koperasi Dalam Pusaran Pembangunan*, Media Komunitas, Koperma UNSOED Edisi 1 2002
- Edilius & Sudarsono, *Kopersi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta; Rhineka Cipta, 1996.
- Esrom Aritonang dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta; Sekretariat Bina Desa, 2001.
- Ginanjart Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta; CIDES, 1996.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung; Rosda Karya, 1998.
- Jhon Clark, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Yogyakarta; Tiara Wacana, 1995.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung; Rosda Karya, 2004.
- Maman Akhmad Rifa'i, *Reorientasi Penyuluhan Pertanian Prasyarat Pertanian Kerakyatan*, Jakarta; Sinar Tani, 2000.
- Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial*, Aditya Media, 2002.
- Nasruddin Harahap, *Interaksi Sosial Transmigrasi dengan Penduduk Lokal*, dalam Jurnal Populis, BEMJ PMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta; Rakesarasin, 1999.
- Soerjono Soekamto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta; Rajawali Press, 1993.
- Sri Wahyuni, *Kinerja Kelompok Tani dalam Sistem Usaha Tani Padi dan Metode Pemberdayaanya*, Bandung; Studio Driya Media, 1994.

Suryadi A, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung; Alumni, 1979

Susetiawan, Makalah disampaikan di depan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, 11 September 2001.

Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998.

T. Moeljarto, *Politik Pembangunan, Konsep, Strategi, dan Arah Kebijakan*, Yogyakarta; Tiara Wacana, 1995.

Wolf Eric., Petani: *Tinjauan Antropologi*, Jakarta: Yayasan Obor, 1993.

Draf RAT-XXVIII KUD Tani Makmur, 2003



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA